



**REFLEKSI KRITIS
POTRET PERSOALAN
ANAK & PEREMPUAN**
(KUMPULAN TULISAN)



DEPARTEMEN KOMINMAS
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISIYAH
PERIODE 2012 - 2016

Atas desakan feminis, pendekatan itu diadopsi PBB. Preambul Piagam PBB versi awalnya menuliskan "equal rights among men" diubah menjadi "equal rights among men and women". Demikian pula Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) mulanya mengonseptkan "all men" untuk menyebutkan semua manusia, diubah menjadi "all human being". Lantas, apakah sejarawan muslim masih berkatat pada *history* tanpa mau membaca kembali bagaimana *history* itu muncul? Adakah niatan tulus untuk memosisikan perempuan dan laki-laki setara, sama-sama berkontribusi membangun sejarah? Bagaimana seandainya Sarah tak mendorong Ibrahim menikahi Hajar, atau Hajar yang enggan membesarkan Ismail, maka mungkin hingga kini tak kan ada sejarah kurban. Untuk itu, sekecil apapun perempuan menorehkan sejarah, saya meyakini itulah kontribusi terbaik perempuan bagi peradaban kita. Selamat Hari Raya Kurban.

Indeks Otonomi Perempuan dalam Rumah Tangga

Oleh: Risni Julaelni Yuhan

Perempuan dalam percaturan rumah tangga dan masyarakat mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam membangun sebuah peradaban. Hal ini tidak terlepas dari perhelatan panjang sejarah, budaya, sosial, ekonomi dan demografi yang mencerminkan tingkat pembangunan serta nilai-nilai dalam masyarakat. Mengingat betapa penting kedudukan perempuan dalam rumah tangga, studi otonomi perempuan terkait pembuatan keputusan dalam rumah tangga telah termaktub dalam beberapa agenda kesepakatan, ataupun keputusan dengan skala internasional. Salah satunya adalah *International Conference of Population and Development (ICPD)* Cairo 1994 yang menghasilkan butir kesepakatan terkait peningkatan status perempuan dan pemberdayaan perempuan. Dalam ICPD ini dikemukakan bagaimana upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berkaitan dengan peningkatan kesehatan anak, kesejahteraan keluarga, kesetaraan dalam rumah tangga, dan penurunan fertilitas.

Selain itu, masalah pemberdayaan dan otonomi perempuan merupakan satu dari delapan tujuan program MDG's yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Otonomi yang lebih umum sering disebut dengan istilah pemberdayaan yang didefinisikan sebagai "ekspansi kemampuan seseorang untuk membuat pilihan hidup yang strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya tidak diakui" (Kabeer, 2001).

Dalam banyak teori kesetaraan gender, otonomi bagi perempuan sering menjadi sorotan, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga juga merupakan indikator kesetaraan gender dan otonomi perempuan dalam rumah tangga.

Menurut Upadhyay et al (2005) dalam penelitiannya mendefinisikan otonomi perempuan secara konservatif, di mana perempuan dikatakan



otonom apabila dia mampu berperan sebagai pembuat keputusan terakhir dalam menentukan suatu keputusan di rumah tangga. Jatrana et al. (2013) otonomi perempuan diukur atas dasar pembangunan indeks, yang disusun berdasarkan informasi yang dikumpulkan terkait kebebasan wanita yang berhubungan dengan aspek *movement* (kebebasan dalam bepergian), keputusan rumah tangga, dan keuangan. Ketiga aspek tersebut selanjutnya akan menjadi dimensi pembentuk indeks otonomi perempuan. Semua dimensi tersebut akan dikaji berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia) tahun 2012 untuk responden perempuan kawin. Selanjutnya perhitungan indeks otonomi perempuan dilakukan sesuai dengan prosedur perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dari UNDP (2014).

Merujuk pada indeks ketimpangan gender (IKG) yang dikeluarkan oleh HRD UNDP, Indonesia termasuk satu dari tiga negara yang memiliki IKG tinggi. Selain itu kondisi budaya patriarki yang ada di Indonesia tanpa disengaja kemudian membentuk perempuan semata-mata berada dalam ketidakberdayaan. Stereotipe perempuan hanya bisa bergerak di wilayah domestik dan segala keputusan ada di pihak laki-laki atau suami. Namun, kondisi demikian seiring dengan waktu terus mengalami perubahan ke arah yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari angka indeks pembangunan gender (IPG) yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 63,9 persen pada 2004 dan 69,6 persen tahun 2013 (BPS dan KPPPA).

Meskipun IPG terus meningkat namun hal tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan karena berdasarkan hasil perhitungan indeks otonomi perempuan masih didominasi oleh kelompok indeks otonomi perempuan dalam rumah tangga kategori rendah sebanyak 58 persen; menengah 29,55 persen; tinggi 7,38 persen dan sangat tinggi sebanyak 4,49 persen. Masih tingginya kelompok indeks otonomi rendah di mana skornya kurang dari 0,05, artinya dengan kata lain masih banyak kaum perempuan yang tidak atau kurang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam masalah *financial mobility*, *household decision making* dan mobilitas fisik.

Dengan demikian kemampuan perempuan untuk mendiskusikan, mengontrol, atau menentukan keputusan mengenai keuangan dalam rumah tangga, baik bersama pasangan maupun dengan anggota keluarga lainnya seperti pengambilan keputusan membelanjakan uang yang diperoleh pasangan atau yang diperolehnya sendiri dan mengenai pengeluaran yang besar keluarga masih cukup rendah. Begitu pun tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam hal kesehatan anak, kesehatan dirinya, dan diskusi penggunaan kontrasepsi serta kebebasan perempuan untuk bepergian baik untuk mengakses fasilitas kesehatan ataupun hanya untuk hiburan.

Tingginya persentase kelompok dengan indeks otonomi rendah ini memerlukan perhatian khusus supaya dapat keluar dari posisi tersebut. Karena apabila hal itu terus dibiarkan maka keberadaan perempuan dalam rumah tangga akan semakin tidak berdaya. Karakteristik perempuan yang memiliki indeks otonomi dalam rumah tangga rendah sebagian besar tinggal di pedesaan, berstatus tidak bekerja, pendidikan SMP ke bawah dan berada pada keluarga sangat miskin.

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan otonomi perempuan dalam rumah tangga. *Pertama*, upaya pengembangan program pemberdayaan dan penyuluhan untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya otonomi perempuan. Program tersebut diarahkan kepada pembangunan *soft skill* perempuan khususnya dalam rangka meningkatkan taraf penghasilan untuk menopang kebutuhannya dalam rumah tangga. Dengan demikian kondisi perempuan akan lebih berdaya dalam hal ekonomi dan dapat keluar dari belunggu kemiskinan; *Kedua*, hendaknya pola pemberdayaan lebih diprioritaskan pada daerah pedesaan dengan tingkat otonomi perempuannya rendah, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya atas keterbatasan akses informasi, jaringan dan berbagai fasilitas penopang lainnya.

Fenomena di atas merupakan cerminan betapa masih banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan rendahnya tingkat kemandirian perempuan. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian pemerintah atau

seluruh stake holder bangsa untuk berfikir serta bergerak secara bersamaan melakukan fungsi-fungsi penyadaran, pendidikan serta pedampingan secara intensif dan simultan. Hal ini tentunya juga merupakan peluang sekaligus tantangan dakwah bagi kepemimpinan Nasyyatul Aisyiyah sebagai organisasi berbasis ke-perempuinan. Jaringan organisasi yang sedemikian kuat dari level pusat sebagai operator dan penggerak sampai tingkat ranting yang berbasis pedesaan merupakan modalitas yang kuat dan besar untuk mewujudkan terciptanya otonomi perempuan dalam berbagai level struktur sosial masyarakat di Indonesia.

Wallahu'alam bishawab



Hak Kesadaran Pribadi

Oleh: Dede Dwi Kurniasih

Dalam sebuah pelatihan, seorang fasilitator menampilkan dua buah gambar kepada seluruh peserta. Gambar tersebut memang masuk dalam kategori vulgar oleh beberapa kelompok masyarakat. Sebuah foto yang menampilkan seorang artis sedang duduk di ayunan dengan belahan dada rendah, rambut disanggul ke atas sehingga menampilkan leher jengangnya, wajahnya terlihat sumringah dihiasi senyum tipis menawan dan kaki jengangnya menyilang sementara kedua tangannya memegang erat kedua tali ayunan. Gambar tersebut bersisian dengan gambar wanita lain yang berdiri, mengenakan gaun hingga menyentuh tanah yang menerawang berwarna putih, sementara itu ia memakai bra dan g-string berwarna hitam mencolok berdiri di bawah siraman air shower kamar mandi sehingga semua nampak jelas dalam pandangan.

Pada Simulasi berikutnya ditampilkan enam buah gambar pria sixpack, dengan hanya mengenakan celana minim. Gambar tersebut diambil dari situs pria dan iklan pakainan dalam pria. Di saat bersamaan, seluruh peserta hanya tersenyum-senyum saja.

Yang menjadi menarik dalam role play di atas adalah konklusi yang dilakukan para peserta saat melakukan *brainstorming*. Tampilan gambar pertama dan kedua sama-sama menampilkan lekuk tubuh yang vulgar dan sangat setara dalam penyampaian. Atau bahkan tidak adil bagi pihak laki-laki karena ditampilkan enam buah gambar sementara perempuan hanya dua gambar. Namun ketika gambar perempuan yang muncul, hampir seluruh pendapat peserta sangat tendensius dengan muncul, tatanan masyarakat, agama dan moral bahwa gambar tersebut merendahkan martabat perempuan. Berbeda ketika gambar kedua yang ditampilkan, rata-rata peserta memberikan komentar singkat dan enteng. Hampir semua peserta berpendapat sama: bagus, ganteng, aurat terbuka, dan kata kata lain yang tidak terlalu tendensius dan tidak menekan. Sangat berbeda saat simulasi pertama.

Pertanyaan mendasar kemudian muncul bahwa mengapa tanggung jawab perkembangan otak seseorang ditentukan oleh selembur foto tak bergerak? Bagaimana mungkin perempuan dapat diatur sedemikian